



**SIARAN PERS**  
**No. 064/I1.A/LL/2020**  
**ITB Kampus Merdeka - *in harmonia progressio***

Institut Teknologi Bandung sebagai salah satu Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) yang sudah hampir 20 tahun mengenyam otonomi yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia memandang penting kebijakan Kampus Merdeka. Evolusi bentuk kemerdekaan yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia kepada beberapa perguruan tinggi, dalam bentuk otonomi pengelolaan akademik dan non-akademik, hingga saat ini telah memberikan hasil yang signifikan dan perlu ditindaklanjuti dengan kebijakan yang lebih membebaskan demi kepentingan pembangunan bangsa Indonesia, dalam bentuk Tridharma perguruan tinggi, baik dengan menghasilkan SDM unggul, kegiatan pengabdian kepada masyarakat langsung dan produk riset dan inovasinya. Berbagai kebebasan seperti membuka prodi dengan bertanggung jawab, mengikuti akreditasi internasional secara sukarela, melakukan transformasi manajemen perguruan tinggi yang *agile*, dan mengembangkan kurikulum untuk menjawab tantangan zaman adalah bagian sekian manfaat dari kebebasan yang telah ITB dan beberapa perguruan tinggi lain alami selama 20 tahun ini.

Kebijakan Kampus Merdeka yang baru saja dicanangkan adalah bentuk penguatan menuju perguruan tinggi yang lebih otonom dan dengan demikian selayaknya didukung dalam implementasinya. ITB mengajak segenap perguruan tinggi dan pemangku kepentingan untuk dapat melihat lebih jelas posisi strategis perguruan tinggi yang otonom, sehingga implementasi kebijakan Kampus Merdeka dapat berjalan efektif.

## Pembangunan SDM Indonesia

### SDM Indonesia dan Peranan Perguruan Tinggi

ITB memandang bahwa sumberdaya manusia (SDM) Indonesia adalah 'ujung tombak' pelaku pembangunan bangsa Indonesia baik di sektor ekonomi, sosial, politik, maupun di sektor ilmu pengetahuan & teknologi dan kebudayaan. SDM Indonesia pada hakikatnya adalah generasi penerus bangsa Indonesia. Kemajuan dan keberlanjutan pembangunan bangsa Indonesia bertumpu di pundak generasi penerus bangsa tersebut.

Perguruan tinggi adalah institusi pendidikan tinggi yang melaksanakan fungsi pengembangan ilmu pengetahuan (*research*), alih ilmu pengetahuan (*teaching*), dan pemanfaatan ilmu pengetahuan (*community services*) secara terpadu—Tridharma Perguruan Tinggi. Perguruan tinggi merupakan pilar dari suatu bangsa dalam mewujudkan *sustainable knowledge-society*. Perguruan tinggi di Indonesia mengemban tugas untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang dibutuhkan bagi kemajuan, kedaulatan dan martabat bangsa—prinsip *locally relevant* dan *globally respected*.

Dengan menjalankan fungsi Tridharma, perguruan tinggi Indonesia berperan dalam menentukan pembangunan dan pembentukan *knowledge competence, intellectual capacity* dan *virtues* dari mahasiswa, baik sebagai potensi SDM maupun sebagai generasi penerus bangsa Indonesia. Perguruan tinggi Indonesia perlu menghasilkan sarjana yang mampu menghadapi dan mengatasi situasi dan permasalahan di dunia-nyata (*real-world*) yang berubah dengan cepat, serta mampu untuk beradaptasi dan merespons kebutuhan-kebutuhan dan tren-tren yang sangat dinamis, dengan senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan dan kebudayaan Indonesia. Perguruan tinggi Indonesia perlu terus-menerus meningkatkan peranannya dalam memandu dan menggerakkan Pembangunan SDM Indonesia, dengan mempererat kerja sama dengan berbagai komponen bangsa lainnya, dan mitra-mitra internasional yang relevan.

### Tantangan Abad ke-21

Dalam masyarakat dunia hari ini, interaksi-interaksi melintasi batas-batas negara, kebangsaan dan kebudayaan berlangsung dengan sangat cepat dan dengan intensitas sangat tinggi. Keadaan ini menuntut perguruan tinggi untuk memiliki kemampuan untuk bergerak secara gesit, responsif dan adaptif terhadap perubahan, visioner dan antisipatif terhadap masa depan.

Masyarakat dunia telah mengalami pergeseran dari masyarakat industrial, menuju masyarakat informasi. Lebih jauh lagi, kemajuan-kemajuan *science & technology* di bidang informasi, nano, bio dan kognitif, telah menimbulkan efek-efek disruptif di sektor-sektor ekonomi, pemerintahan dan kehidupan sosial secara umum. Pola-pola manufaktur, produksi, distribusi dan konsumsi barang dan jasa tengah mengalami perubahan-perubahan disruptif, dan semakin *knowledge intensive*. Hari ini, cara-cara pengetahuan dihasilkan, disirkulasikan dan diadopsi semakin berpola jejaring (*networks*), bukan lagi berpola linier 'hulu-hilir' ataupun 'pusat-periperal'. SDM Indonesia semakin dituntut untuk memberikan (*to deliver*) kinerja terbaiknya dalam situasi seperti ini.

Perguruan tinggi Indonesia perlu terus-menerus menyempurnakan *learning system & environment* di kampus, untuk memastikan bahwa para mahasiswa semakin mampu dalam:

- 1) berpikir analitik, berpikir kritis, berpikir sistematis/kompleksitas, dan berpikir *problem-solving* secara strategis;
- 2) menggali dan menerapkan ilmu pengetahuan secara lintas-disiplin, berkomunikasi dalam keanekaragaman sudut pandang, serta berkolaborasi dalam tim untuk merealisasikan solusi-solusi;
- 3) terlibat secara lebih erat dengan situasi dunia-nyata dengan menjalankan *Work Based Learning* (WBL) atau *Problem Based Learning* (PBL), yang didukung dengan ketrampilan *learning by doing* dan *learning by interaction*.

## Kolaborasi Tripple-Helix dan Kebijakan Kampus Merdeka

ITB percaya bahwa peranan perguruan tinggi dalam menghasilkan SDM yang terbaik bagi bangsa Indonesia, akan semakin kuat apabila didukung oleh berbagai pelaku di sektor-sektor industri dan pemerintahan. Kolaborasi tiga serangkai, atau *triple-helix* perguruan tinggi-industri-pemerintah perlu terus-menerus dikembangkan dan diperluas untuk memberikan sistem dan lingkungan pembelajaran yang terbaik bagi para mahasiswa. Dalam kolaborasi tiga serangkai tersebut, masing-masing pihak perlu terus-menerus meningkatkan peranannya untuk mencapai tujuan-tujuan bersama untuk kepentingan kemajuan dan keberlanjutan bangsa Indonesia.

### 1) Peranan Perguruan Tinggi

Perguruan tinggi perlu memperluas dan mempererat kolaborasi dengan industri untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang menghadirkan berbagai kasus dan permasalahan dunia-nyata (*real-world cases and problems*). Dalam lingkungan pembelajaran tersebut, mahasiswa meningkatkan kemampuan untuk beradaptasi dan merespons situasi dunia-nyata, dengan berbagai ketidakpastian dan risiko di dalamnya, dengan melaksanakan *problem based learning*, *work based learning* atau metode-metode lain yang sejenis.

### 2) Peranan Industri/Organisasi sosial

Perusahaan/organisasi sosial menjalin kolaborasi dengan perguruan tinggi dalam koridor upaya perusahaan/organisasi sosial tersebut untuk meningkatkan kapasitas inovasi, dan rencana pengembangan SDM. Dalam koridor tersebut perusahaan/organisasi sosial berkolaborasi dengan perguruan tinggi untuk membentuk (*to shape*) kurikulum pendidikan berdasarkan ekspektasi akan kompetensi sarjana yang mereka harapkan, serta menciptakan lingkungan pembelajaran bagi pelaksanaan *problem based learning*, *work based learning*.

### 3) Peranan Pemerintah

Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah memainkan peranan yang penting dalam memfasilitasi kolaborasi antara perguruan tinggi dan perusahaan/organisasi sosial dengan mengimplementasikan kebijakan dan

regulasi yang memadai. Bersama-sama dengan perguruan tinggi dan perusahaan/organisasi sosial, pemerintah perlu turut terlibat dalam pengembangan strategi pendidikan yang responsif terhadap kebutuhan-kebutuhan nasional ataupun daerah, serta menyediakan pendanaan.

Dalam perspektif kolaborasi tiga serangkai, atau *triple-helix* perguruan tinggi-industri-pemerintah sebagaimana diuraikan di atas, ITB memandang Kebijakan Kampus Merdeka yang digulirkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, sebagai langkah yang strategis untuk memperluas kebebasan kampus, dan memperkuat peranan Perguruan Tinggi dalam membangun SDM Indonesia.

Kebijakan Kampus Merdeka tersebut memfasilitasi kolaborasi yang lebih luas dan lebih erat antara perguruan tinggi dan berbagai perusahaan/organisasi sosial dalam kerangka upaya menyediakan sistem dan lingkungan pembelajaran, yang dibutuhkan bagi mahasiswa untuk menjadi SDM Indonesia yang unggul dan memiliki daya saing. Implementasi Kebijakan Kampus Merdeka tersebut perlu disertai dengan pembelajaran di antara unsur-unsur perguruan tinggi, industri/organisasi sosial, dan pemerintah, dan dievaluasi secara berkala untuk menjamin tercapainya tujuan-tujuan bersama serta menerapkan prinsip *continuous improvement*.

## Pengalaman ITB

ITB telah mengadopsi paradigma perguruan tinggi otonom sejak menjadi Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara (PT-BHMN), dengan diterbitkannya statuta ITB melalui PP No.155 tahun 2000. Sejak saat itu, ITB mengalami perubahan mendasar dan besar dalam pengelolaan bidang akademik dan non-akademik. Saat ini ITB telah merasakan otonomi perguruan tinggi dalam bentuk Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH), dengan statuta berdasarkan PP No. 65 tahun 2013.

## Pengembangan Program Studi

ITB senantiasa mencermati perkembangan dan pergeseran yang terjadi pada lingkungan nasional maupun global: perkembangan di dunia ilmu pengetahuan & teknologi, pergeseran industrialisasi dan ekonomi, dinamika kebutuhan nasional akan ilmu pengetahuan & teknologi serta SDM. ITB telah melakukan berbagai kajian terhadap efek-efek disruptif dari kemajuan-kemajuan *science & technology* di bidang-bidang informasi, nano, bio dan kognitif, baik di sektor-sektor ekonomi, pemerintahan maupun kehidupan sosial secara umum. ITB sendiri merupakan pelaku dalam penelitian & pengembangan di bidang-bidang tersebut, dengan hasil-hasil yang telah mendapatkan pengakuan internasional. Dalam 5 (lima) tahun terakhir ITB telah memperkenalkan *emerging knowledge* seperti *artificial intelligence* (AI), *cyber security*, *Internet of Things* (IoT) dan lain sebagainya baik dengan cara *embedded* di dalam kurikulum, maupun menjadi bagian dari penelitian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa.

Berdasarkan langkah-langkah itu semua, ITB telah, dan senantiasa melakukan penyesuaian-penyesuaian kurikulum dan sistem pembelajaran dalam kerangka upaya pengembangan program-program studi baik pada jenjang S1, S2 maupun S3. Senat Akademik ITB telah merumuskan berbagai landasan normatif akademik yang diperlukan bagi pengembangan program studi tersebut.

### Akreditasi Program Studi

Hingga saat ini, sebanyak 92% dari keseluruhan jumlah program studi (prodi) di ITB sudah meraih akreditasi A dari BAN-PT. Hampir sepertiga dari keseluruhan jumlah prodi telah meraih akreditasi internasional. *Tracer study* terus-menerus dilakukan dan disempurnakan untuk selalu memantau respons dunia tenaga kerja terhadap para lulusan ITB. *Response rate* dari *tracer study* yang dilakukan ITB sejak tahun 2015 persentasenya selalu di atas 90%. Ini artinya data *tracer study* ITB dapat diandalkan (*reliable*). Dari data *tracer study* kurun waktu 2015-2019, didapatkan bahwa pada kisaran 62-71% lulusan ITB bekerja di bidang-bidang yang relevan dengan bidang akademik prodi yang telah ditempuh. Selain ini semua, sekitar 86,7% dari keseluruhan lulusan ITB berhasil mendapatkan pekerjaan dalam waktu kurang dari 6 bulan. Persentase tingkat kepuasan terhadap tingkat kepentingan dari dunia usaha dan dunia industri terhadap kompetensi lulusan ITB berkisar pada 90,3%.

ITB terus-menerus memperluas kerjasama dengan perguruan-perguruan tinggi terbaik di luar negeri untuk menyediakan pengalaman internasional bagi para mahasiswa maupun dosen. Skema kerjasama internasional seperti AUN-SEED, AOTULE dan lain sebagainya, memungkinkan mahasiswa mengambil kredit mata kuliah di berbagai perguruan tinggi terkemuka di dunia. Pada tahun 2019, sebanyak 2.023 mahasiswa ITB terlibat dalam program pertukaran pelajar ke luar negeri, dan 102 mahasiswa ITB mengikuti program studi *double degree* (gelar ganda) dengan perguruan-perguruan tinggi di luar negeri. ITB menjadi bagian dalam inisiasi program kerjasama penelitian dan inovasi dengan MIT, yaitu program MIRA. Selain dengan perguruan tinggi kelas dunia, ITB banyak melakukan kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri baik dalam negeri maupun luar negeri. Kegiatan magang di perusahaan atau industri telah menjadi pengganti kerja praktik (KP) di berbagai program studi di ITB dengan didahului oleh kerjasama dengan industri/usaha terkait.

### Transformasi menjadi PTNBH

Berdasarkan pengalaman dan pembelajaran yang telah ditempuh, ITB memandang bahwa Kebijakan Kampus Merdeka tentang transformasi PTN menuju PTNBH sebagai langkah yang strategis untuk mendorong kemandirian serta inovasi PTN, dalam merespons berbagai tantangan baik di lingkungan lokal, nasional maupun global. ITB memandang bahwa PTNBH bukan semata-mata status sebuah perguruan tinggi, tetapi sebagai *enabler* untuk perguruan tinggi lebih relevan bagi bangsa Indonesia.

ITB merasakan kebutuhan untuk adanya peta jalan perubahan bertahap dan terukur serta pengelolaan perubahan (*change management*) dalam kepemimpinan (*leadership*) yang kuat. Sistem tata kelola baik bidang akademik dan non-akademik yang berbasiskan pada *best practices* menjadi kunci dengan kustomisasi sesuai dengan budaya organisasi dan kebutuhan lokal. Model-model pengelolaan bidang akademik dan non-akademik dari beberapa perguruan tinggi yang telah lebih dahulu melakukan transformasi dari PTN menjadi PTNBH, selayaknya dibagikan untuk menjadi acuan awal perubahan yang dibutuhkan bagi PTN yang berharap dapat berubah menjadi PTNBH.

### Pembelajaran di Luar Prodi

ITB telah mengembangkan berbagai skema untuk meningkatkan *outreach* dan *engagement* ITB dengan berbagai elemen-elemen lain di masyarakat. Di antaranya adalah:

- 1) Skema untuk mahasiswa:
  - a. KKN yang diselenggarakan berdasarkan tema-tema yang kontekstual (KKN-T)
  - b. Kerja Praktek (KP) yang diselenggarakan dengan melibatkan perusahaan, industri dan alumni
  - c. Program magang di perusahaan atau industri
- 2) Skema untuk dosen:
  - a. Penyelenggaraan Dosen Magang (bagi dosen luar ITB yang ingin magang di ITB)
  - b. Pelaksanaan Program *Sabbatical Leave* dan SAME Dikti (bagi dosen ITB yang ingin magang di PT luar negeri)

KKN-T telah diselenggarakan untuk memastikan bahwa hasil-hasil penelitian di ITB dapat diaplikasikan, dan diadopsi oleh masyarakat. KKN-T ITB diselenggarakan melalui kerjasama dengan berbagai pemerintahan daerah di Indonesia. Pihak-pihak pemerintahan daerah telah turut terlibat dalam penentuan tema dan lokasi pelaksanaan KKN-T. Penyelenggaraan KKN-T telah menciptakan lingkungan pembelajaran dunia-nyata (*real-world learning environment*) yang melibatkan mahasiswa dan dosen ITB (pembimbing KKN-T), unsur-unsur perguruan tinggi lokal, serta unsur-unsur perusahaan/organisasi sosial dan pemerintahan daerah.

Selain penyelenggaraan KKN-T, Kerja Praktek juga diwajibkan di sebagian besar prodi S1 di ITB dengan beban 2 SKS. Pelaksanaan Tugas Akhir Mahasiswa juga pada umumnya berkaitan erat dengan permasalahan di dunia-nyata, dan secara informal telah melibatkan masukan-masukan dari pihak-pihak industri/organisasi sosial dan pemerintah. Dengan demikian, pada prinsipnya, kurang lebih 3 semester kegiatan

pembelajaran mahasiswa telah bersifat 'pembelajaran di luar prodi'. Kinerja dari sistem pembelajaran tersebut di atas dapat dilihat dari hasil *tracer study* ITB, yang menyatakan bahwa kemampuan bekerja di dunia-nyata para mahasiswa sudah sangat baik: kemampuan memecahkan masalah kompleks, berpikir kritis, bekerja dalam tim, adaptasi dengan lingkungan, selain kokoh dalam pengetahuan di dalam disiplinnya, kemampuan bahasa asing, dan kemampuan untuk bekerja dalam tim dan di bawah tekanan.

ITB juga telah membuka jalan bagi kerjasama yang lebih erat dengan berbagai perguruan tinggi yang lain. Salah satunya adalah dengan berpartisipasi dalam Program Dosen Magang Dikti, sebagai tempat pembinaan dosen-dosen dari PT di seluruh Indonesia. Setiap tahun rata-rata ada 20 dosen dari berbagai PT di Indonesia yang mengikuti program ini. Selain itu ITB juga membuka kesempatan bagi mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi lain di dalam negeri, untuk mengikuti perkuliahan di ITB. Sejak 2016, tercatat sebanyak 25 mahasiswa perguruan tinggi lain telah menempuh perkuliahan di ITB.

Berbagai skema yang telah dikembangkan ITB untuk melakukan *outreach* dan *engagement* tersebut di atas perlu disempurnakan lagi dengan menerapkan prinsip *continuous improvement*.

## Tantangan ke Depan

ITB meyakini bahwa Kebijakan Kampus Merdeka yang digulirkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia merupakan langkah yang strategis untuk meningkatkan dan memperkuat peranan Perguruan Tinggi dalam membangun SDM Indonesia. Implementasi dari Kebijakan Kampus Merdeka akan memperluas dan mempererat kolaborasi tiga serangkai (*triple-helix*) perguruan tinggi-industri/organisasi sosial-pemerintah untuk mewujudkan kemajuan dan keberlanjutan bangsa.

Untuk merespons kebijakan Kampus Merdeka ini, ITB akan selalu berupaya menjawab tantangan zaman dan kebutuhan bangsa, sesuai dengan misinya untuk menciptakan, berbagi dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, ilmu sosial, dan ilmu humaniora serta menghasilkan sumber daya insani yang unggul untuk menjadikan Indonesia dan dunia lebih baik.

Untuk mendukung implementasi kebijakan Kampus Merdeka tersebut, ITB memandang beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian bersama:

Pertama, status PTNBH merupakan *enabler* bagi sebuah perguruan tinggi untuk berkembang dan lebih merdeka. Beberapa kendala dalam implementasi otonomi yang penuh, terkait dengan koordinasi dengan kementerian lain, memerlukan perhatian agar lebih efektif. Kebijakan terkait khusus PTNBH perlu segera

diselaraskan dengan cita-cita otonomi perguruan tinggi yang penuh dan bertanggung jawab.


Kedua, kegiatan penelitian dan kegiatan pengajaran adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Meskipun perusahaan dan organisasi sosial dapat memberikan iklim pembelajaran yang baik bagi mahasiswa, perusahaan dan organisasi sosial bukan merupakan produsen ilmu pengetahuan. Dalam hal ini, peranan perguruan tinggi dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan menjadi hal yang krusial. Untuk kepentingan kemajuan dan keberlanjutan bangsa, ke depan kolaborasi perguruan tinggi-industri/organisasi sosial-pemerintah perlu lebih luas dari sebatas penciptaan lingkungan pembelajaran. Kolaborasi tersebut perlu mencakup pengembangan ilmu pengetahuan 'masa depan', yang dipandang strategis dalam memandu pembangunan bangsa Indonesia di berbagai bidang. Kebijakan Kampus Merdeka merupakan langkah yang sangat penting untuk mencapai tujuan tersebut. Ke depan, koordinasi secara lintas kementerian diperlukan agar kolaborasi perguruan tinggi-industri/organisasi sosial-pemerintah dapat memberikan hasil-hasil yang terbaik.

Ketiga, demi tercapainya tujuan-tujuan Pembangunan SDM Indonesia, peran serta berbagai pelaku industri/organisasi sosial dan sektor-sektor pemerintahan daerah merupakan hal yang sangat penting. Perusahaan-perusahaan pada skala UMKM dan organisasi-organisasi sosial berskala daerah perlu berperan serta demi terwujudnya Pembangunan SDM Indonesia secara merata dan adil. Untuk ini, diperlukan sosialisasi Kebijakan Kampus Merdeka ke berbagai unsur masyarakat tersebut.

Keempat, pengembangan sistem dan lingkungan pembelajaran perlu dilakukan secara komprehensif dan koheren, mencakup prodi lama dan prodi baru. Kemudahan-kemudahan dalam pembukaan prodi baru yang diberikan melalui Kebijakan Kampus Merdeka, perlu diikuti dengan perbaikan secara menyeluruh terhadap prodi-prodi yang sudah ada. Relevansi prodi-prodi yang sudah ada dengan dinamika kebutuhan di masyarakat perlu terus-menerus diperkuat, dengan melakukan perbaikan-perbaikan. Menurut hemat kami, pengusulan prodi baru sebaiknya dilakukan hanya dalam kondisi di mana prodi-prodi yang ada, betul-betul tidak mampu merespons kebutuhan-kebutuhan baru.

Bandung, 4 Februari 2020

Disampaikan oleh

  
Rektor Institut Teknologi Bandung  
Prof. Reini Wirahadikusumah, Ph.D.

